

28 Juta Orang Indonesia Berpotensi

Dari Halaman 1

gangguan kesehatan mental. Menurutnya, ini merupakan fenomena gunung es. "WHO bilang, masalah kejiwaan itu satu dari delapan sampai satu dari sepuluh orang. Jadi, kalau Indonesia 280 juta penduduk, minimal 28 juta punya masalah kejiwaan," ujar Budi, seperti dilansir dari detikhealth. Adapun berdasarkan data yang dimiliki Kementerian Kesehatan, kasus gangguan kesehatan mental yang terdeteksi masih rendah. Hal ini terlihat dari laporan cek kesehatan gratis (CKG). "Dari hasil skrining yang kita lakukan, angkanya masih kecil sekali. Untuk orang dewasa bahkan masih di bawah 1 persen, sementara

Aparat Didesak Proses Hukum 28 Perusahaan

Dari Halaman 1

wilayah adat masyarakat adat bukanlah peristiwa alam yang biasa. Bencana tersebut merupakan akumulasi dari kebijakan perizinan yang mengabaikan aspek lingkungan, menyingkirkan masyarakat, dan memprioritaskan kepentingan korporasi di atas keselamatan rakyat," kata Sekretaris Eksekutif Bakumsu, Juniaty Aritonang, Rabu (21/1). Juniaty menegaskan, pencabutan izin ini tidak boleh berhenti sebagai keputusan administratif. Pencabutan ini semata tidak dapat menghapus tanggung jawab negara. Pasalnya dampak kerusakan hutan masih nyata dirasakan oleh masyarakat. "Salah satu perusahaan yang dicabut izinnya adalah PT. Toba Pulp Lestari (TPL). Perusahaan kertas ini selama puluhan tahun mengelola hutan yang

Kasus Korupsi Limbah Sawit, Kejagung Geledah

Dari Halaman 1

limbah minyak kelapa sawit pada 2022 yang tengah diusut Kejagung. "Kami konfirmasi bahwa pada sekitar beberapa waktu yang lalu kami pernah melakukan pengeledahan di salah satu atau dua tempat, tempat penukaran uang asing," Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung Syarif Sulaeman Nahdi kepada wartawan di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (21/1/2026). "Itu terkait dengan penyidikan kita dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata kelola CPO atau POME ya," lanjutnya. Pengegeledahan, kata Syarief, telah dilakukan pada akhir Desember lalu. Namun dia tak merinci detail lokasi money changer yang digeledah. Dia hanya

657 Ribu Siswa dan 56 Ribu Guru Jadi Korban

Dari Halaman 1

"Tercatat 4.549 satuan pendidikan terdampak yang berimplikasi pada terganggunya layanan pendidikan bagi sekitar 657.193 peserta didik serta aktivitas pembelajaran oleh 56.882 guru," ujar Mu'ti dalam rapat di Komisi X DPR, Rabu (21/1). Dia menyebut pemerintah telah mengambil langkah cepat. Pihaknya ingin agar para siswa tetap mendapat haknya sebagai peserta didik, kendati dalam situasi darurat. Hingga saat ini, ujar Mu'ti, pihaknya telah

RS Martha Friska Batasi Pasien Poliklinik

Dari Halaman 1

Dalam aplikasi Mobile JKN, kuota pendaftaran poliklinik disebut sudah penuh meski satu hari sebelum hari pelayanan. "Di aplikasi hanya dibuka 14 orang sehari. Kami sebagai pasien PRB sangat dirugikan. Padahal kami diwajibkan pakai Mobile JKN," ujar Suwani kepada wartawan. Keanehan semakin terlihat saat wartawan mengonfirmasi langsung ke pihak rumah sakit. Humas RS Martha Friska Mutatuli menyebutkan bahwa pendaftaran melalui Mobile JKN memang hanya terlapor 14 orang pada hari tersebut.

Ketua PWI Sumut Ingatkan Kasus Topan.....

Dari Halaman 1

Farianda heran, karena telah mengenal sosok Alexander Sinulingga yang menjadi ajudan eks Wali Kota Medan Abdullah usai tamat dari STPDN waktu itu. "Dulu Alex sangat sopan dan santun, tidak som-bong atau arogan," ujarnya. Namun sekarang berbeda setelah memimpin Dinas Pendidikan Provsu berani melarang wartawan masuk di kantor milik negara yang dibiayai oleh rakyat dan menjadi kantor pelayanan umum. "Saya ingatkan adinda Alex jangan sampai terjadi kasus Topan kedua. Kenapa takut dengan wartawan. Ada apa gerangan. Karena masyarakat tahu banyak pengaduan masyarakat (dumas) terkait proyek raksasa sewaktu Alex menjabat Kadis Perkim Citaru Kota Medan," terangnya. Farianda menyinggung kepemimpinan Gubsu Muhammad Bobby Nasution, Kapolda Sumut Irfen Pol Wisnu Hermawan dan Pangdam I/BB Mayjen TNI Hendy Antariksa dan Kejatisu Harli Siregar hubungan-nya sangat bagus dengan wartawan. "Pak Bobby membuat pressroom wartawan. Polda, Kejati dan Kodam I/BB juga sangat harmonis bersama wartawan juga menyediakan buat ruangan bagus untuk wartawan," tegasnya. "Saya minta kepada adik saya, Alex, jangan begitu sama wartawan. Ketika adinda menjauh dari wartaw-an, sesungguhnya adinda sedang mengorek lubang yang dalam untuk kuburan sendiri," jelasnya. Pejabat publik harus siap dikritik dan bersedia memberikan klarifikasi dan konfirmasi terkait pemberitaan di media. Tugas wartawan sebagai sosial kontrol supaya berita itu berimbang harus ada konfirmasi. "Kalau Alex tertutup, maka miring beritanya. Wartawan adalah profesi yang mulia dan dibutuhkan oleh masyarakat," ujarnya. Farianda mengapresiasi Gubsu Bobby Nasution memerintahkan kepada seluruh OPD menyampaikan

pada anak-anak sekitar 5 persen," kata Budi. Adapun gangguan kesehatan mental yang dilaporkan beragam. Mulai dari depresi, gangguan kecemasan (anxiety disorder), ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), hingga yang berat, skizofrenia. Meski angka tersebut terbilang rendah, Budi mengatakan bukan berarti masyarakat Indonesia terbebas dari masalah kesehatan mental. Pasalnya, ada banyak kasus yang belum terdeteksi, dilaporkan, bahkan penderitanya banyak yang belum berani mencari pertolongan. Lalu bagaimana solusi dari Kemenkes? Budi mengatakan, saat ini sistem layanan kesehatan jiwa di berbagai puskesmas sedang diperkuat. Kemenkes sudah menyiapkan tata laksana

mengakibatkan hilangnya ruang hidup masyarakat adat, memicu konflik agraria yang berkepanjangan, kriminalisasi, dan menghilangkan ketahanan pangan serta sumber air masyarakat sekitar," ujarnya. Pascapencabutan izin ini, Bakumsu menilai pemerintah harus mengembalikannya untuk dikelola masyarakat sebagai ruang hidup yang aman dan bermartabat bagi komunitas adat. Momentum pencabutan izin ini harus menjadi titik balik reformasi tata kelola kehutanan yang berpihak pada keadilan ekologis. "Tanpa pemulihan yang adil, partisipasi bermakna masyarakat dan jaminan agar konflik tidak terulang, keputusan ini berisiko hanya menjadi simbol politik semata," paparnya. Oleh karena itu, Bakumsu tetap mendesak pemerintah untuk segera melakukan proses penegakan hukum terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran lingkungan dan berkontribusi pada

menyebut ada yang berlokasi di pusat perbelanjaan. "Waktunya mungkin akhir bulan Desember menjelang tahun baru. Tepatnya di beberapa tempat di Jakarta (Utara dan Selatan). Kebetulan money changer-nya ada di pusat perbelanjaan," ungkap dia. Syarief menjelaskan, pengegeledahan itu untuk mendalami transaksi dan aliran dana terkait perkara yang diusut. Meski begitu, dia menyatakan belum dapat membeberkan terkait dengan siapa. "Kami melakukan pengegeledahan itu dan itu dalam rangka kami mencari dugaan aliran-aliran dana ke satu atau dua orang melalui tempat penukaran," jelas dia. "Memang ada aliran uang, dari mana dan ke mananya belum bisa kami buka. Namanya belum bisa kita sampaikan, itu materi penyidikan, tapi terkait langsung dengan konteks penyidikan (POME) itu," terang Syarief.

memberikan 27 ribu paket school kit kepada siswa terdampak. Kemendikdasmen juga telah mendirikan 168 unit tenda belajar darurat, 147 ruang kelas darurat, dan dana operasional darurat untuk 1.339 satuan pendidikan. Selain itu, ada pula tunjangan bencana bagi 16.467 guru terdampak, dukungan psikososial di 680 satuan pendidikan, dan 147.670 buku untuk mendukung keberlanjutan pembelajaran. "Semoga seluruh bantuan tersebut dapat mendukung kebutuhan anak-anak kita untuk tetap mendapatkan hak pendidikannya meskipun dalam

Namun, saat diminta menunjukkan data sistem, seorang petugas perempuan memperlihatkan layar pendaftaran yang menunjukkan adanya pasien ke-15 yang baru terdaftar pada pukul 19.00 WIB, di luar jam pelayanan poliklinik. Fakta ini memunculkan dugaan kuat bahwa sistem pendaftaran bersifat "buka-tutup" dan dapat berubah sewaktu-waktu. Apakah pendaftaran memang dibatasi?Hingga berita ini masuk ke meja redaksi, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Medan, Dr Yasmine, belum memberikan tanggapan meski telah dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp. Padahal, BPJS Kesehatan mewajibkan seluruh peserta menggunakan aplikasi Mobile JKN

program-programnya kepada wartawan di Kantor Kominfo Sumut. "Ini membuktikan gubernur sudah membuka diri untuk media. Kok malah bisa Alex menutup diri," paparnya. Dia mengingatkan, jangan sampai kebablasan dan mengingatkan bahwa wartawan harus dirangkul dan bukan dijauihi atau dimusuhi. Apalagi melarang wartawan. "PWI Sumut akan memberi perlindungan anggota-nya atas tindakan semena-mena oknum Kadisdiksu ini," tutup Farianda. **Wartawan Dilayani di Ruang PPID** Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Alexander Sinulingga, menegaskan bahwa Dinas Pendidikan Sumut tidak pernah menutup diri atau melarang wartawan melakukan peliputan, sebagaimana sempat diberitakan sejumlah media. Penegasan itu disampaikannya saat menjawab wartawan Mimbar Umum di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Rabu (21/1/2026) sore. Alexander menjelaskan, sejak dirinya menerima amanah dari Gubernur untuk membenahi Dinas Pendidikan, salah satu fokus utama yang dilakukan adalah pembenahan internal dan penataan sistem kerja, termasuk tata kelola penerimaan tamu, baik dari unsur internal maupun eksternal. "Dalam beberapa kali pengecekan langsung, saya mendapati adanya tamu yang masuk ke ruang-ruang tertentu tanpa identitas yang jelas dan tidak melalui mekanisme resmi. Bahkan, ada kejadian yang tidak kita harapkan, khususnya di ruang-ruang strategis," ujar Alexander. Berangkat dari temuan tersebut, lanjutnya, pimpinan Dinas Pendidikan kemudian menggelar rapat internal dan menyepakati perlunya mekanisme yang lebih tertib dan terawasi, tanpa mengurangi prinsip keterbukaan dan pengawasan publik. Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan memusatkan layanan tamu di Ruang Pejabat Pengelola

penanganan yang mencakup obat-obatan hingga layanan konseling. "Kita sedang bangun sistemnya supaya nanti pelayanan kesehatan jiwa bisa dilakukan di puskesmas-puskesmas," ucap Budi. Kemenkes berharap upaya ini bisa memperluas akses terhadap layanan kesehatan mental. Tantangan lain yang perlu dijawab, yakni stigma di masyarakat yang masih kuat terkait pengidap gangguan kesehatan mental. Budi menegaskan, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jika tidak ditangani dengan baik, gangguan mental bisa memengaruhi produktivitas kerja, kualitas hidup, hingga stabilitas sosial masyarakat secara umum.(**cnni/js**)

bencana ekologis, termasuk menelusuri pertanggung-jawaban korporasi dan aktor pengambil kebijakan. "Mewajibkan pemulihan ekologis secara menyeluruh dan terukur di wilayah terdampak, dengan mekanisme pengawasan publik yang transparan dan melibatkan masyarakat terdampak secara bermakna, pengembalian dan pengakuan wilayah adat," papar Juniaty. Tak hanya itu, pemerintah harus menjamin pemulihan hak korban, termasuk hak atas lingkungan hidup yang sehat, hak atas penghidupan, serta perlindungan khusus bagi Perempuan, anak dan masyarakat adat yang menghadapi dampak berlapis akibat bencana. "Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin-izin lain di wilayah rawan bencana, penghentian praktik perizinan yang mengabaikan persetujuan masyarakat, serta pengakuan dan perlindungan wilayah kelola masyarakat adat," sebutnya.(**ant/js**)

Dia menyebut sejumlah dokumen turut disita penyidik dalam pengegeledahan ini. Namun tidak ada barang bukti mata uang asing disita dari pengegeledahan ini. "Barang bukti yang kami sita adalah berupa dokumen. Karena yang kami cari adalah jejak-jejak transaksi di situ dan yang kami cari adalah dokumen-dokumen yang ada di situ," imbuhnya. Sebagai informasi, Kejagung memang tengah mengusut kasus dugaan korupsi ekspor palm oil mill effluent (POME) atau limbah minyak kelapa sawit pada 2022. Kejagung belum benar-benar menjelaskan duduk perkara kasus ini. Hanya, disebutkan perkara ini masih dalam proses penyidikan. Kejagung sebelumnya juga telah menggeledah lima lokasi terkait kasus ini. Di antara lokasi-lokasi itu, disebutkan ada kantor hingga rumah pejabat Bea Cukai yang turut digeledah. (**det/js**)

kondisi yang sangat terbatas," katanya. Sebagai respons cepat, ujar Mu'ti, pihaknya juga telah menerbitkan surat Edaran Menteri berisi petunjuk teknis pembelajaran di daerah terdampak bencana. Menurut dia, Edaran itu akan menjadi pedoman bagi sekolah untuk tetap beradaptasi memasuki semester genap mulai 5 Januari. "Kebijakan ini menjadi pedoman bagi satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pembelajaran pada semester genap tahun ajaran 2025-2026 yang dimulai pada 5 Januari 2026 dengan pendekatan yang adaptif terhadap kondisi lapangan," katanya.(**cnni/js**)

sebagai pintu utama akses pelayanan. Ketika sistem tersebut justru diduga membatasi hak pasien, maka hal ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan kontrol pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Medan. Jika praktik pembatasan ini benar terjadi, maka pasien BPJS bukan hanya dirugikan secara administratif, tetapi juga terancam kehilangan hak atas pelayanan kesehatan yang dijamin undang-undang. Kasus ini pun diharapkan menjadi perhatian serius BPJS Kesehatan Pusat, Dinas Kesehatan, dan Ombudsman RI, agar tidak ada lagi diskriminasi dan permainan kuota dalam pelayanan kesehatan.(**A-10**)

Informasi dan Dokumentasi (PPID). Alexander menegaskan, kebijakan tersebut berlaku umum, tidak hanya bagi pihak eksternal seperti wartawan, tetapi juga bagi tamu internal, termasuk kepala sekolah dan unsur pendidikan lainnya. Semua tamu, kata dia, diterima terlebih dahulu di ruang PPID yang berada di lantai satu kantor Dinas Pendidikan. "Tidak benar Dinas Pendidikan tertutup. Semua tamu kami terima di ruang PPID. Di sana sudah kami siapkan fasilitas yang layak. Dari situ, pejabat atau bidang yang ingin ditemui akan turun langsung," ujarnya. Ia menambahkan, mekanisme ini justru dimaksudkan untuk memperbaiki tata kelola, mencegah praktik-praktik yang tidak sesuai aturan, serta memastikan seluruh proses berjalan transparan dan profesional. Alexander juga menegaskan bahwa pihaknya tetap membuka ruang masukan dan pengawasan dari media. "Saya sendiri beberapa kali menerima wawancara, bahkan hadir langsung dalam kegiatan peliputan. Jadi, silakan media datang, melapor ke PPID, dan akan difasilitasi," katanya. Menurut Alexander, penataan ini sejalan dengan pesan Gubernur Sumatera Utara agar tidak ada lagi praktik-praktik yang menyimpang di lingkungan pendidikan. "Kalau ada yang salah, kita tegakkan aturan. Tidak ada kepentingan tersembunyi," ujarnya. Ia mengakui kemungkinan adanya mispersepsi di lapangan, dan untuk itu menyampaikan harapan agar semua pihak dapat saling memahami. "Kami ingin membangun hubungan kemitraan yang lebih baik dengan media. Media adalah mitra strategis dalam mendorong pendidikan yang bersih dan profesional," kata Alexander. Dinas Pendidikan Sumut menegaskan komitmennya terhadap keterbukaan informasi, sekaligus penataan internal demi terciptanya lingkungan kerja yang tertib, akuntabel, dan transparan (**A-05/A-09**)

Rico Waas Diminta

Dari Halaman 1

Kota Medan Ibrahim kepada wartawan, Rabu (21/1). Sebab, Plt Kadis Naker Kota Medan, Ramadhan, telah mengabaikan peran federasi buruh yang ada di ibukota Sumatera Utara ini. Ibrahim mengkritisi ketertutupan Plt Kepala Disnaker Medan kepada serikat buruh. Buktinya, saat acara silaturahmi Pol-restabes Medan dengan perwakilan buruh yang digelar di Hotel Antares, Rabu (21/1), Dinas Tenaga Kerja Kota Medan selaku penggagas, tak melibatkan seluruh federasi buruh yang ada di Kota Medan. "Jelas kami kecewa, koordinasi Dinas Tenaga Kerja Kota Medan sangat minim. Harusnya Disnaker Kota Medan menjadi 'orangtua' bagi seluruh serikat pekerja," sesal pria yang juga menjabat Bendahara K-SPSI AGN Kota Medan ini. Ia juga mengaku telah mencoba membuka komunikasi, tapi Plt Kadisnaker, seolah tak peduli. "Waktu dihubungi melalui pesan Whatsapp, hanya centang satu, entah diblokir atau ganti nomor, kita pun bingung," sesal Ibrahim.

Lamban Tangani Kasus Kecelakaan Kerja Selain itu, Ibrahim juga menyatakan, Dinas Tenaga Kerja Kota Medan sangat lamban menindaklanjuti penanganan kasus kecelakaan kerja yang telah memakan korban jiwa dalam beberapa bulan terakhir, seperti diabaikan oleh Disnaker Medan. Ibrahim pun menceritakan dua insiden tragis yang hingga kini dianggap belum mendapatkan tindak lanjut yang jelas dari pihak pemerintah. Seperti, kecelakaan kerja yang dialami supir truk di lokasi proyek Jalan Cut Mutia, Medan. Korban meninggal dunia setelah tertimpa truk saat bekerja. Selanjutnya, seorang pekerja papan reklame yang tewas disengat listrik di Jalan HM Jhoni, persisnya di Supermarket Altic. Ibrahim mengungkapkan, berdasarkan informasi dari pihak keluarga korban, hingga saat ini belum ada perkembangan atau laporan signifikan dari Disnaker Kota Medan terkait hak-hak pekerja maupun sanksi bagi pihak terkait. "Sampai hari ini nasib dan derita keluarga korban yang tewas tidak ada kepastian akan hak-hak yang diterima, baik santunan maupun perlindungan sosial seperti BPJS," ungkap Ibrahim. Untuk itu, ia meminta kepada Wali Kota Medan Rico Waas mengevaluasi jajarannya, terlebih yang ada di Disnaker Kota Medan. Karena dinilai tak sejalan dan sangat jauh dari slogan Medan untuk Semua.(**A-10**)

Guru di Tangel Jadi

Dari Halaman 1

kata Kasat Reskrim Polres Tangel, AKP Wira Graha Setiawan saat dikonfirmasi, Rabu (21/1). Dalam perkara ini, YP dijerat Pasal 418 KUHP Juncto Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman pidana 12 tahun penjara. Wira menyebut YP saat ini juga sudah ditahan setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka. "Sudah tadi malam kita tahan," ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, Wira menyebut dalam aksi kejahatnya itu YP ternyata turut menjanjikan iming-iming kepada korban. Mulai dari uang hingga mainan. (**cnni/js**)



Harus Dianggap Serius

Dari Halaman 1

Dalam bahasa ilmiah, ini disebut estimasi epidemiologis. Namun dalam praktik kebijakan publik, estimasi semacam ini bukanlah hal sepele. Negara-negara di dunia menggunakan pendekatan serupa untuk membaca risiko kesehatan, terutama pada isu yang bersifat laten dan sulit terdeteksi seperti kesehatan mental. Masalah kesehatan mental tidak seperti penyakit fisik yang mudah diukur dengan alat medis sederhana. Ia kerap tersembunyi di balik senyum, prestasi, jabatan, bahkan kesalehan. Banyak orang tetap bekerja, belajar, dan bersosialisasi sambil memikul depresi, kecemasan, atau kelelahan mental yang akut. Karena itu, ketika negara hanya memiliki data "pasti" dalam jumlah kecil, itu bukan berarti masalahnya kecil, melainkan deteksi dan keberanian untuk melapor masih sangat terbatas. Dalam kajian kesehatan masyarakat, kondisi ini dikenal sebagai fenomena gunung es. Data resmi yang terlihat hanyalah puncak kecil di permukaan. Di bawahnya, terdapat massa masalah yang jauh lebih besar, tak terlihat, dan berpotensi lebih berbahaya. Maka, angka dugaan justru sering kali menjadi sinyal awal bahwa sebuah persoalan sedang tumbuh diam-diam dalam skala luas. Kesehatan mental sesungguhnya bukan persoalan individual semata. Ia memiliki dampak langsung terhadap produktivitas nasional, kualitas sumber daya manusia, dan ketahanan sosial. Indonesia sedang menikmati bonus demografi, tetapi bonus ini bisa berubah menjadi beban jika generasi usia produktif mengalami krisis mental massal. Stres berkepanjangan, kecemasan kolektif, dan depresi sosial akan melemahkan daya saing bangsa di tengah kompetisi global. Ironisnya, persoalan sebesar ini masih sering diperlakukan sebagai isu pinggir. Stigma sosial membuat gangguan mental dianggap sebagai kelemahan pribadi, bukan masalah struktural. Layanan kesehatan jiwa masih terbatas, tenaga profesional tidak merata, dan literasi kesehatan mental belum menjadi agenda utama pendidikan maupun media. Dalam situasi seperti ini, menuntut data yang sepenuhnya pasti sebelum bertindak justru merupakan bentuk kelalaian kebijakan. Dalam banyak kasus, negara tidak boleh menunggu kepastian absolut untuk bertindak. Risiko pandemi ditan- gani sebelum semua angka lengkap. Ancaman bencana diantisipasi meski bersifat probabilistik. Demikian pula dengan kesehatan mental. Jika estimasi saja sudah menunjukkan potensi puluhan juta warga terdampak, maka itu cukup untuk menjadikannya prioritas nasional. Lebih dari itu, bisa jadi angka 28 juta justru merupakan underestimate. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa ketika skrining kesehatan mental diperluas dan stigma menurun, jumlah kasus yang terdeteksi justru meningkat. Bukan karena masyarakat semakin "sakit", melainkan karena semakin banyak yang berani dan mampu mengakses bantuan. Perdebatan seharusnya tidak berhenti pada soal apakah angka itu dugaan atau bukan. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apa yang akan dilakukan negara dan masyarakat ketika alarm itu sudah berbunyi? Mengabaikannya hanya karena belum pasti sama saja dengan menutup mata terhadap krisis yang sedang tumbuh perlahan. Angka dugaan 28 juta bukan sekadar statistik. Ia adalah cermin kegelisahan sosial, tekanan hidup modern, dan tantangan besar bangsa di masa depan. Menganggapnya serius bukan berarti berlebihan, melainkan bentuk tanggung jawab terhadap kemanusiaan dan keberlanjutan Indonesia.